

► POTENSI KORUPSI APBD

## Fitra Desak BPK Lapor Aparat Hukum

SEMARANG—Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan potensi korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng 2012 senilai Rp651,261 miliar ke aparat penegak hukum.

Menurut Koordinator Fitra Jateng, Maya Dina, kalau memang ada indikasi pidana korupsi dalam penggunaan APBD, BPK bisa melaporkannya ke kejaksaan atau kepolisian. "BPK harus proaktif melaporkan temuan dugaan korupsi penyelenggaraan negara ke aparat penegak hukum," kata Maya di Semarang, Rabu (3/7).

Meski menurut dia sebenarnya tanpa ada laporan pun kejaksaan dan kepolisian bisa melakukan penyelidikan kasus korupsi, karena korupsi bukan delik aduan. Maya menyatakan kebocoran dana APBD Jateng, seperti dana hibah dan bantuan sosial (bansos), kerap terjadi setiap tahun.

"Kondisi ini menunjukkan kelemahan Pemerintah Provinsi [Pemprov] dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan APBD." Untuk mencegah terjadinya korupsi pada penggunaan APBD, Maya mengusulkan ke depan BPK tidak hanya melakukan audit administrasi pelaporan keuangan, tetapi juga audit kinerja.

Sebab, selama ini hasil audit administrasi yang dilakukan BPK tidak berbanding lurus dengan kinerja penggunaan anggaran yang masih kerap diwarnai penyelewengan. "Contohnya ya pada kasus APBD Jateng 2012, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian [WTP], tapi ternyata masih ada potensi korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp651,261 miliar."

### Belum Tentu Korupsi

Direktur Riset dan Kebijakan Publik The Jateng Institute, Sukarman, menduga terjadi penyimpangan dalam penggunaan APBD Jateng 2012 senilai Rp651,261 miliar. (SOLOPOS, 3/7). Sayangnya, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Bambang Adiputranta, belum bisa dimintai konfirmasi. Saat *Espos* datang ke kantornya di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Semarang, Rabu siang, Bambang tidak berada di tempat. "Kalau mau ketemu Bapak [Bambang] silakan menghubungi dulu ke bagian hukum dan humas," ujar petugas penerima tamu BPK Perwakilan Jateng.

Terpisah, anggota DPRD Jateng, Arif Awaludin, mengungkapkan potensi kerugian keuangan negara dalam APBD Jateng 2012 belum tentu Rp651,261 miliar. Sebab, sektor-sektor yang mendapat rekomendasi BPK karena laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya belum beres, masih merampungkan laporan.

"Kami sudah tanyakan ke beberapa satuan kerja perangkat daerah [SKPD], mereka menjawab segera merampungkan administrasinya," ujar Arif kepada *Espos* di Semarang, Rabu. Menurut dia, BPK memberikan tenggang waktu selama tiga bulan sejak laporan hasil pemeriksaan (LHP) APBD Jateng 2012 diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, 24 Mei lalu, untuk menindaklanjuti rekomendasi.

"Jadi sekarang masih dalam tenggang waktu BPK, sehingga belum bisa dikatakan terjadi kerugian keuangan negara." Kecuali, imbuh Arif, semisal sampai Agustus mendatang ada SKPD yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. "Kalau sudah menyangkut pidana, DPRD akan meminta agar diproses secara hukum."

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Sri Puryono, menyatakan memang ada rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti terkait pelaporan penggunaan anggaran APBD Jateng 2012 di beberapa SKPD. Dia sudah mengingatkan SKPD bersangkutan. "Batas waktunya sampai 24 Juli. Jangan buru-buru membuat kesimpulan terjadi korupsi." (Insetyonoto)